

DAFTAR PUSTAKA

- A.Jisdam Syarifuddin., at all. (2024). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Pada Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan)*. 2, 270–282.
- Afifah, S. N., Subarno, A., & Akbarini, N. R. (2023). Implementasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo. *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, 7(2), 171. <https://doi.org/10.20961/jikap.v7i2.62402>
- Aithan, I., Frinaldi, A., & Eka Putri, N. (2025). *Jurnal Ekonomi dan Administrasi Modern Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Berdasarkan Apbd Tahun 2024*. 9(2), 8–21. <https://journal.fexaria.com/j/index.php/>
- Davis, G. B. (1991). *Sistem informasi manajemen: landasan konseptual, struktur, dan pengembangan*. PT Pustaka Binamas Pressind.
- Edwards, G. C. (1980). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Erlambang, P. A. (2023). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat salah satu tugas dan fungsi pemerintah Pengelolaan keuangan daerah memiliki peran penting dalam mendukung berbagai beberapa kegiatan dalam mengelola keuangan daerah . Berdasarkan Peraturan Pemerintah Proses pengelolaan keuangan pada setiap Pemeritah Daerah diperlukan suatu dokumen sebagai pedoman penyusunan anggaran antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menganah Daerah diharapkan pada saat proses penganggaran dapat digunakan dengan efektif dan efesien . sebagai pedoman penyusunan RKPD dan APBD . pertimbangan guna mencapai tujuan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan.*
- Hakim, W. J. (2019). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ambon Provinsi Maluku. *Ayan*, 8(5), 55.
- Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Penerapan E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Pakpak Bharat, Pub. L. No. 70 (2019). <https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/7227>

- Ir. Arry Avorizano, M. K. (2024). *Sistem Informasi Modern*.
- Jaya, K., Mustafa, D., & Maldun, S. (2025). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Badan Penelitian, Pengembangan Dan Perencanaan Di Kabupaten Polewali Mandar. *Paradigma Journal of Administration*, 3(1), 52–56. <https://doi.org/10.35965/pja.v3i1.6028>
- Jogiyanto. (2005). *Sistem Informasi Strategis*. Andi Offset. Sistem Informasi Strategis oleh Jogiyanto (2005)
- Laoli, M., Ndraha, A., Telaumbanua, Y., & Indah Laoli Ayler Ndraha Yasminar Telaumbanua, M. B. (2022). Implementasi Sipd Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Nias (Studi Kasus Bpkpd Sebagai Leading Sektor Penganggaran) Sipd Implementation in Regional Financial Management in Nias District (Case Study of Bpkpd As the Leading Budgeting Se. *Emba*, 10(4), 1381–1389.
- Laudon, K. C. L. dan J. P. (2018). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (15th ed.). Pearson.
- Nyengka, I., Marlissa, E., & Aedah, N. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pada BKPSDM Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1), 10–17.
- Paat, F. F. (2023). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Cimahi*. 4(1), 1–8.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. *Permendagri Republik Nomor 70, Nomor 65(879)*, 2004–2006.
- Pratommi, M. W. (2023). *Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah*. 3(4), 99–109.
- Putri Pratama¹, I. M. (2025). *Tinjauan Literatur Perkembangan Akuntansi Sektor Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. 6(1), 35–45.
- Rohmi, P. K. (2025). *Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara*. 1, 155–162.
- Rongcai, R. E. N., Guoxiong, W. U., & Ming, C. A. I. (2020). *Efektivitas Sistem*

Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. 2020.

- Saputra, R. H., & Novitasari, D. (2025). *Analisis Efisiensi Struktur Data pada Implementasi SISKEUDES : Studi Kasus Pekon Gunung Kasih*. 5(2), 123–131.
- Sayuri, G. E. J. (2025). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2025). Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 7(4), 193–208.
- Suryatimur., at all. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah (Bppkad) Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Akuntansi, Auditing, Dan Perpajakan*, 4(1), 7.
- Tumija, & Zakky Ramadhan, A. (2023). Efektivitas Perencanaan Anggaran Dalam Sistem Informasi Affiliation. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 10(2), 143–157. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/>
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pub. L. No. 14. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-14-tahun-2008>
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pub. L. No. 25 (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pub. L. No. 14 (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38869/uu-no-14-tahun-2008>
- Warsyena, R., & Wibisono. (2021). Analysis Of Challenges And Obstacles In The Implementation Of The Republic Of Indonesia Regional Government Information System (SIPD RI) For Financial Administration In The Department Of Human Rights, Spatial Planning And Land Affairs Of Kotawaringin Timu. *Nusantara Hasana Journal*, 1(7), 132–137.
- Widiandono, E. (2016). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Blitar. *Jurnal Supremasi*, 6(1), 4. <https://doi.org/10.30957/supremasi.v6i1.385>

- Wurara, C. N. C., Stefanus Sampe, Donald K. Monintja, Michael Mamentu, Fanley N. Pangemanan, & Steeva G. Rondonuwu. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kota Tomohon. *Journal Publicuho*, 7(2), 802–810. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.436>
- Zosadak, Jonston dan Prof. Wuryan Andayani, SE, Ak., M. S. (2025). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Pemerintah Kabupaten Kaimana Papua Barat*.



**UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**

Nomor Pokok Perpustakaan: 5371002D2020114
Jl. Prof Dr. Herman Johanes, Penfui Timur, Kupang Tengah, Kab. Kupang.
Website: <https://perpustakaan.unwira.com/> e-mail: lib.unwira@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 0266/WM.H16/SK.CP/2026

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Thereza Anggie Binsasi
NIM : 33122144
Fakultas/Prodi : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Dosen Pembimbing : 1. Maria O. Veronica Moi, SE, M.Sc
2. Antonius Y.W. Timuneno, S. Akun, M.S.A
Judul Skripsi : **STUDI KASUS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM
INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

Skripsi yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **19% (Sembilan Belas) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 25 Februari 2026

Kepala UPT Perpustakaan,


Damianus Dami, S.Ptk.